

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Gambaran umum KPP Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km. 9 Ngabul Tahunan Jepara, 59624. Telepon: 0291-596403, 596410, 596423-4. Fax: 0291-596342.

Kantor Pelayanan Pajak diatur dalam Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak Pasal 58 yaitu: KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pasal 59 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB;

¹ Website resmi KPP Pratama Jepara, diakses 27 Agustus 2019.

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan bekas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

b. Visi Misi KPP Pratama Jepara

1. Visi KPP Pratama Jepara
Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.
2. Misi KPP Pratama Jepara
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:
 - a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
 - b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
 - d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

c. Tugas KPP Pratama Jepara

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat peraturan menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal pajak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional, Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)

2. Gambaran Umum Responden

a. Deskripsi Identitas Responden

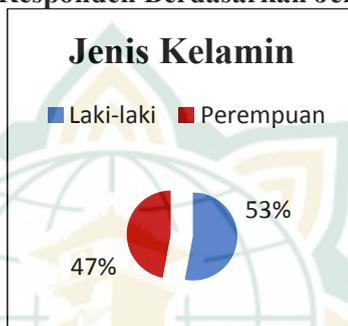
Identitas responden merupakan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan diri responden secara individu, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang merupakan responden wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

b. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul diperoleh gambar tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Gambar 4.1

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



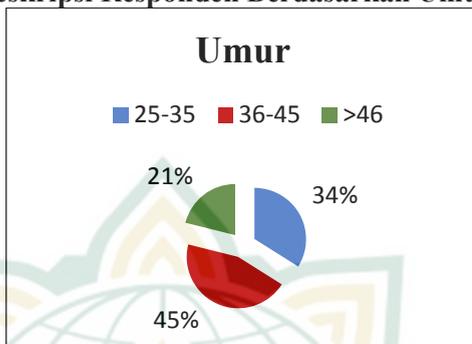
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 53% (53 responden) sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 47% (47 responden). Jadi dalam penelitian ini responden laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

c. Umur Responden

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul diperoleh gambar tentang jumlah responden berdasarkan umur sebagai berikut:

Gambar 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur



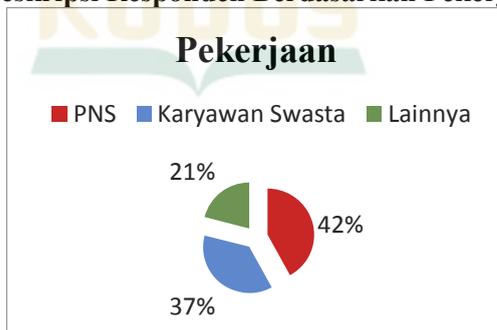
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, menunjukkan dari 100 responden yang menjadi sampel yang berusia antara 25-35 tahun sebanyak 34% (34 responden), yang berusia antara 36-45 tahun sebanyak 45% (45 responden), dan yang berusia >46 tahun sebanyak 21% (21 responden).

d. Pekerjaan Responden

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul diperoleh gambar tentang jumlah responden berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan



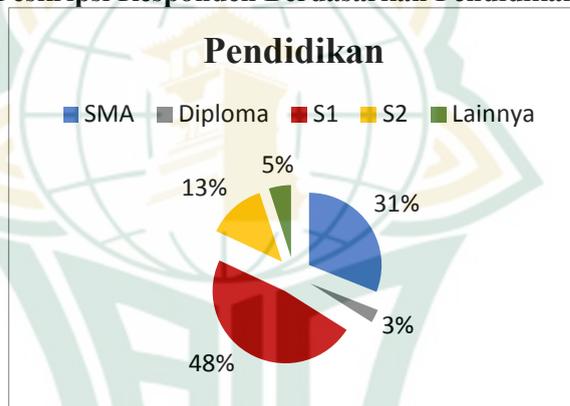
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel yang bekerja sebagai PNS sebanyak 42% (42 responden), yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 37% (37 responden), dan yang bekerja sebagai lainnya sebanyak 21% (21 responden).

e. Pendidikan Responden

Data mengenai umur responden wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel, responden yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 31% (31 responden), D1 yaitu sebanyak 3% (3 responden), S1 yaitu sebanyak 48% (48 responden), S2 yaitu sebanyak 13% (13 responden), dan pendidikan lainnya yaitu sebanyak 5% (5 responden).

3. Deskripsi Data Penelitian

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran

wajib pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Adapun tanggapan responden mengenai pernyataan pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Deskripsi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	Jawaban					Persentase %
		SS %	S %	N %	TS %	STS %	
1.	Batas waktu pelaporan SPT	23	37	36	3	1	100
2.	Prosedur membayar pajak penghasilan	24	34	33	8	1	100
3.	Batas waktu membayar pajak	22	35	34	5	4	100
4.	Peraturan perpajakan	20	42	31	5	2	100
5.	Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak	18	55	24	2	1	100
6.	Sanksi tidak membayar pajak	19	44	31	5	1	100
7.	Sanksi terlambat melaporkan SPT	21	39	34	5	1	100
8.	Tata cara mendapatkan NPWP	19	38	33	8	2	100

9.	Tarif pajak yang dibayarkan	19	38	36	6	1	100
	Rata-rata	20,6	40,2	32,4	5,2	1,6	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa responden menjawab sangat setuju (SS) dengan persentase rata-rata sebesar 20,6%, responden yang menjawab setuju (S) dengan persentase rata-rata 40,2%, responden yang menjawab netral (N) dengan persentase rata-rata 32,4%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) dengan persentase rata-rata 5,2% dan responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) dengan rata-rata 1,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Jepara sudah baik.

Indikator item 1 dari pengetahuan perpajakan batas waktu pelaporan SPT. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 23% responden menyatakan sangat setuju, 37% responden menyatakan setuju, 36% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak mengetahui batas waktu pelaporan SPT.

Indikator item 2 dari pengetahuan perpajakan adalah prosedur pembayaran pajak penghasilan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 24% responden menyatakan sangat setuju, 34% responden menyatakan setuju, 33% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan sebagian

kecil responden tidak mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Indikator item 3 dari pengetahuan perpajakan adalah batas waktu membayar pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 22% responden menyatakan sangat setuju, 35% responden menyatakan setuju, 34% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak setuju dan 4% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden mengetahui batas waktu membayar pajak. Sedangkan sebagian besar responden tidak mengetahui batas waktu membayar pajak.

Indikator item 4 dari pengetahuan perpajakan adalah peraturan perpajakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu 20% responden menyatakan sangat setuju, 42% responden menyatakan setuju, 31% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui peraturan perpajakan. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui peraturan perpajakan.

Indikator item 5 dari pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan PTKP, PKP dan tarif pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 18% responden menyatakan sangat setuju, 55% responden menyatakan setuju, 24% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui PTKP, PKP, dan tarif pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui PTKP, PKP, dan tarif pajak.

Indikator item 6 dari pengetahuan perpajakan adalah sanksi tidak membayar pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 19% responden menyatakan sangat setuju 44%

responden menyatakan setuju, 31% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui sanksi yang di dapat jika tidak membayar pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui sanksi yang di dapat jika tidak membayar pajak.

Indikator item 7 dari pengetahuan perpajakan adalah sanksi melaporkan SPT. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 21% responden menyatakan sangat setuju, 39% responden menyatakan setuju, 34% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui sanksi yang di dapat jika terlambat melaporkan SPT. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui sanksi yang di dapat jika tidak melaporkan SPT.

Indikator item 8 dari pengetahuan perpajakan adalah tata cara mendapatkan NPWP. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 19% responden menyatakan sangat setuju, 38% responden menyatakan setuju, 33% responden menyataka nnetral, 8% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mengetahui tata cara mendapatkan NPWP. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui tata cara mendapatkan NPWP.

Indikator item 9 dari pengetahuan perpajakan adalah tarif pajak yang dibayarkan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 19% responden menyatakan sangat setuju, 38% responden menyatakan setuju, 36% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden

mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan sebagian kecil responden tidak mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan merasa, mengerti akan tanggung jawab perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Adapun tanggapan responden mengenai pernyataan kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Deskripsi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Jawaban					Persentase %
		SS %	S %	N %	TS %	STS %	
1.	Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku	16	47	35	0	2	100
2.	Membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara	15	40	38	5	2	100
3.	Membayar pajak untuk pembangunan negara	23	42	27	6	2	100
4.	Manfaat yang diterima dari membayar pajak	16	48	33	2	1	100
5.	Menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa paksaan	18	37	42	1	2	100
6.	Menunda membayar pajak dapat merugikan negara	14	46	37	2	1	100
7.	Mengurangi	19	38	37	4	2	100

	beban pajak dapat merugikan negara						
8.	Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar	15	44	38	2	1	100
	Rata-rata	17	42,7	35,9	2,8	1,6	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan persentase rata-rata 17%, responden yang menjawab setuju (S) dengan persentase rata-rata 42,7%, responden yang menjawab netral (N) dengan persentase rata-rata 35,9%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) dengan persentase rata-rata 2,8%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) dengan persentase rata-rata 1,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Jepara sudah baik.

Indikator item 6 dari kesadaran wajib pajak adalah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 16% responden menyatakan sangat setuju, 47% responden menyatakan setuju, 35% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan sebagian kecil responden tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator item 2 dari kesadaran wajib pajak adalah membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara. Tanggapan responden pada pernyataan ini

sangat beragam yaitu, 15% responden menyatakan sangat setuju, 40% responden menyatakan setuju, 38% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden menyadari bahwa membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara. Sedangkan sebagian kecil responden tidak menyadari bahwa membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara.

Indikator item 3 dari kesadaran wajib pajak adalah membayar pajak untuk pembangunan negara. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 23% responden menyatakan sangat setuju, 42% responden menyatakan setuju, 27% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden menyadari bahwa membayar pajak untuk pembangunan negara. Sedangkan sebagian kecil responden tidak menyadari bahwa membayar pajak untuk pembangunan negara.

Indikator item 4 dari kesadaran wajib pajak adalah manfaat yang diterima dari membayar pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 16% responden menyatakan sangat setuju, 48% responden menyatakan setuju, 33% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden menyadari manfaat yang diterima dari membayar pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak menyadari manfaat yang diterima dari membayar pajak.

Indikator item 5 dari kesadaran wajib pajak adalah menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa paksaan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 18% responden menyatakan

sangat setuju, 37% responden menyatakan setuju, 42% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian responden menjawab jalur tengah antara menjalankan kewajiban wajib pajak tanpa paksaan dan menjalankan kewajiban wajib pajak dengan paksaan. Sedangkan sebagian kecil responden menjalankan kewajiban wajib pajak dengan paksaan.

Indikator item 6 dari kesadaran wajib pajak adalah menunda membayar pajak dapat merugikan negara. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 14% responden menyatakan sangat setuju 46% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden menyadari bahwa menunda membayar pajak dapat merugikan negara. Sedangkan sebagian kecil responden tidak menyadari bahwa menunda membayar dapat merugikan negara.

Indikator item 7 dari kesadaran wajib pajak adalah mengurangi beban pajak dapat merugikan negara. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 19% responden menyatakan sangat setuju, 38% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 4% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menyadari bahwa mengurangi beban pajak dapat merugikan negara. Sedangkan sebagian kecil responden tidak menyadari bahwa mengurangi beban pajak dapat merugikan negara.

Indikator item 8 dari kesadaran wajib pajak adalah menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 15% responden menyatakan

sangat setuju, 44% responden menyatakan setuju, 38% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar wajib pajak mau menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Sedangkan sebagian kecil wajib pajak tidak mau menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

c. Variabel Biaya Kepatuhan

Biaya Kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun tanggapan responden mengenai pernyataan biaya kepatuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Deskripsi Jawaban Variabel Biaya Kepatuhan

No	Indikator	Jawaban					Persentase %
		SB %	B %	N %	TB %	STB %	
1.	Biaya jasa konsultan pajak	13	35	46	2	4	100
2.	Biaya belajar tentang pajak	14	36	41	6	3	100
3.	Biaya transportasi	16	36	41	3	4	100
4.	Biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak	14	36	42	5	3	100
5.	Biaya fotocopy dokumen	14	37	43	5	1	100
6.	Biaya mempersiapkan berkas pajak	14	38	42	3	3	100
7.	Meluangkan waktu untuk menyetorkan pajak	13	36	44	5	2	100
8.	Meluangkan waktu untuk membaca	14	41	40	4	1	100

formulir SPT dan buku petunjuk							
Rata-rata	14	36,9	42,4	4,1	2,6	100	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat bersedia (SB) dengan persentase rata-rata sebesar 14%, responden yang menjawab bersedia (B) dengan persentase rata-rata 36,9%, responden yang menjawab netral (N) dengan persentase rata-rata 42,4%, responden yang menjawab tidak bersedia (TB) dengan persentase rata-rata 4,1%, dan responden yang menjawab sangat tidak bersedia (STB) dengan persentase rata-rata 2,6%. Jadi dapat disimpulkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak sebagai aspek penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan membayar pajak.

Indikator item 1 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya jasa konsultan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 13% responden menyatakan sangat bersedia, 35% responden menyatakan bersedia, 46% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak bersedia dan 4% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden memilih jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya untuk jasa konsultan pajak dan tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk jasa konsultan pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk jasa konsultan pajak.

Indikator item 2 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya belajar tentang pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 14% responden menyatakan sangat bersedia, 36% responden menyatakan bersedia, 41% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak bersedia dan 3% responden menyatakan sangat tidak

bersedia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menjawab jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya besar untuk belajar tentang pajak dan tidak bersedia mengeluarkan biaya besar untuk belajar tentang pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak bersedia mengeluarkan biaya besar untuk belajar tentang pajak.

Indikator item 3 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya transportasi. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 16% responden menyatakan sangat bersedia, 36% responden menyatakan bersedia, 41% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak bersedia dan 4% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan sebagian besar responden memilih jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya transportasi dan tidak bersedia mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kantor pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak bersedia mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kantor pajak.

Indikator item 4 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak,. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 14% responden menyatakan sangat bersedia, 36% responden menyatakan bersedia, 42% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak bersedia dan 3% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan bahwa responden memilih jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak dan tidak bersedia mengeluarkan biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak bersedia mengeluarkan biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak.

Indikator item 5 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya fotocopy dokumen. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu,

14% responden menyatakan sangat bersedia, 37% responden menyatakan bersedia, 43% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak bersedia dan 1% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden memilih jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya fotocopy dokumen dan tidak bersedia mengeluarkan biaya fotocopy dokumen. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak bersedia mengeluarkan biaya fotocopy dokumen.

Indikator item 6 dari variabel biaya kepatuhan adalah biaya mempersiapkan berkas pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam yaitu, 14% responden menyatakan sangat bersedia, 38% responden menyatakan bersedia, 42% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak bersedia dan 3% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden memilih jalur tengah antara bersedia mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan berkas pajak dan tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan berkas pajak. Sedangkan sebagian kecil responden tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan berkas pajak.

Indikator item 7 dari variabel biaya kepatuhan adalah meluangkan waktu untuk menyetorkan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 13% responden menyatakan sangat bersedia, 36% responden menyatakan bersedia, 44% responden menyatakan netral, 5% responden menyatakan tidak bersedia dan 2% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden menjawab jalur tengah antara meluangkan waktu untuk menyetorkan pajak dan tidak meluangkan waktu untuk menyetorkan pajak. Sedangkan sebagian

kecil responden tidak meluangkan waktu untuk membayar pajak.

Indikator item 8 dari variabel biaya kepatuhan adalah meluangkan waktu untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuk. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 14% responden menyatakan sangat bersedia, 41% responden menyatakan bersedia, 40% responden menyatakan netral, 4% responden menyatakan tidak bersedia dan 1% responden menyatakan sangat tidak bersedia. Hal ini menandakan sebagian besar responden mau meluangkan waktu untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuk. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak mau meluangkan waktu untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuk.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun tanggapan responden mengenai pernyataan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Jawaban					Persentase %
		SS %	S %	N %	TS %	STS %	
1.	Melaporkan SPT tepat waktu	15	60	23	1	1	100
2.	Membayar pajak tepat waktu	16	60	22	0	2	100
3.	Memenuhi peraturan tentang perpajakan	20	40	37	1	2	100
4.	Membayar denda apabila mempunyai	19	33	44	2	2	100

	tunggakan						
5.	Tidak memiliki tunggakan pajak	20	36	35	7	2	100
6.	Memenuhi kewajiban tunggakan pajak	15	44	37	3	1	100
7.	Pengetahuan mengenai penghitungan pajak	16	43	37	1	3	100
8.	Menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang	16	39	41	2	2	100
9.	Membayar kekurangan pajak	14	58	26	1	1	100
10.	Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan	19	35	39	6	1	100
	Rata-rata	17	44,8	34,1	2,4	1,7	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden menjawab sangat setuju (SS) dengan persentase rata-rata sebesar 17%, responden yang menjawab setuju (S) dengan persentase rata-rata 44,8%, responden yang menjawab netral (N) dengan persentase rata-rata 34,1%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) dengan persentase rata-rata 2,4, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju (STS) dengan persentase rata-rata 1,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara sudah baik

Indikator item 1 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah melaporkan SPT tepat waktu. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 15% responden menyatakan sangat setuju, 60% responden menyatakan setuju, 23% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan hanya sebagian kecil responden yang tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Indikator item 2 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak tepat waktu. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 16% responden menyatakan sangat setuju, 60% responden menyatakan setuju, 22% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden sudah membayar pajak tepat waktu. Sedangkan hanya sebagian kecil responden yang tidak membayar pajak tepat waktu.

Indikator item 3 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi peraturan tentang perpajakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 20% responden menyatakan sangat setuju, 40% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden memenuhi peraturan perpajakan. Sedangkan hanya sebagian kecil responden yang tidak memenuhi peraturan perpajakan.

Indikator item 4 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah membayar denda apabila mempunyai tunggakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 19% responden menyatakan

sangat setuju, 33% responden menyatakan setuju, 44% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden memilih jalur tengah antara membayar denda atau tidak saat mempunyai tunggakan. Sedangkan hanya sebagian kecil responden yang tidak membayar denda saat mempunyai tunggakan.

Indikator item 5 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah tidak memiliki tunggakan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 20% responden menyatakan sangat setuju, 36% responden menyatakan setuju, 35% responden menyatakan netral, 7% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden tidak memiliki tunggakan membayar pajak. Sedangkan hanya sebagian kecil responden memiliki tunggakan membayar pajak.

Indikator item 6 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban tunggakan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 15% responden menyatakan sangat setuju 44% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden memenuhi kewajiban tunggakan pajak. Sedangkan hanya sebagian kecil responden tidak memenuhi kewajiban tunggakan pajak.

Indikator item 7 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan mengenai penghitungan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 16% responden menyatakan sangat setuju, 43% responden menyatakan setuju, 37% responden menyatakan netral, 1% responden

menyatakan tidak setuju dan 3% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mempunyai pengetahuan mengenai penghitungan pajak. Sedangkan hanya sebagian kecil responden tidak mempunyai pengetahuan mengenai penghitungan pajak.

Indikator item 8 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 16% responden menyatakan sangat setuju, 39% responden menyatakan setuju, 41% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju dan 2% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Sedangkan hanya sebagian kecil responden tidak mampu menghitung, menyetor dan melaporkan tunggakan pajak.

Indikator item 9 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah membayar kekurangan pajak. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 14% responden menyatakan sangat setuju, 58% responden menyatakan setuju, 26% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menandakan sebagian besar responden membayar kekurangan pajak. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak membayar kekurangan pajak.

Indikator item 10 dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan. Tanggapan responden pada pernyataan ini sangat beragam, yaitu 19% responden menyatakan sangat setuju, 35% responden menyatakan setuju, 39% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak setuju dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini

menandakan sebagian besar responden memilih jalur tengah antara tidak ingin diketahui bahwa pernah dijatuhi hukuman atau tidak mengerti pernyataan yang tertera. Sedangkan sebagian kecil responden yang pernah dijatuhi hukuman perpajakan.

4. Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk tingkat validitas, dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini, besarnya df dapat dihitung $30-3$ atau df 27 dengan α 0,05 di dapat r_{tabel} 0,367. Jika r_{hitung} (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*) lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil analisis validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS yang hasilnya dapat disederhanakan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	R tabel	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.568	0,367	Valid
2		.775	0,367	Valid
3		.540	0,367	Valid
4		.776	0,367	Valid
5		.621	0,367	Valid

6		.721	0,367	Valid
7		.603	0,367	Valid
8		.588	0,367	Valid
9		.502	0,367	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai *pearson correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,367) yang berarti semua pertanyaan dikatakan valid.

Hasil uji validitas variabel kesadaran wajib pajak tersaji dalam tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	R tabel	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.474	0,367	Valid
2		.717	0,367	Valid
3		.716	0,367	Valid
4		.549	0,367	Valid
5		.598	0,367	Valid
6		.673	0,367	Valid
7		.633	0,367	Valid
8		.487	0,367	Valid

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai *pearson correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,367) yang berarti semua pertanyaan dikatakan valid.

Hasil uji validitas variabel biaya kepatuhan tersaji dalam tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Validitas Variabel Biaya Kepatuhan

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	R tabel	Keterangan
1	Biaya Kepatuhan (X3)	.685	0,367	Valid
2		.660	0,367	Valid
3		.723	0,367	Valid
4		.729	0,367	Valid
5		.839	0,367	Valid
6		.623	0,367	Valid
7		.600	0,367	Valid
8		.678	0,367	Valid

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai *pearson correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,367) yang berarti semua pertanyaan dikatakan valid.

Hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak tersaji dalam tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	R tabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.739	0,367	Valid
2		.444	0,367	Valid
3		.649	0,367	Valid
4		.665	0,367	Valid
5		.582	0,367	Valid
6		.642	0,367	Valid

7		.756	0,367	Valid
8		.577	0,367	Valid
9		.573	0,367	Valid
10		.500	0,367	Valid

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2019.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai *pearson correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,367) yang berarti semua pertanyaan dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, penulis menggunakan analisis SPSS 16. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$ maka tidak dapat dikatakan reliabel. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas non responden sebesar 30 orang. Adapun uji reliabilitas hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliability Coeffiens	Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan(X_1)	0,60	0,817	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,60	0,754	Reliabel
Biaya Kepatuhan(X_3)	0,60	0,847	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0,821	Reliabel

SumberData : Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa masing-masing variable memiliki nilai *Cronbach Alpha* $>$

0.60. dengan demikian, semua variabel (X_1 , X_2 , X_3 dan Y) dapat di katakan *reliabel*.

c. Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Sedangkan jika tidak terjadi multikolinieritas maka nilai $tolerance > 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Persamaan		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,415	2,408	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,226	4,429	Tidak terjadi Multikolinieritas
Biaya Kepatuhan (X_3)	0,306	3,273	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai tolerance $0,415 > 0,1$ dan nilai VIF $2,408 < 10$. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai tolerance $0,226 > 0,1$ dan memiliki nilai VIF $4,429 < 10$. Biaya Kepatuhan memiliki nilai tolerance $0,306 > 0,1$ dan memiliki nilai VIF $3,273 < 10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson test*. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
2.280	1.956

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.11 di atas, dapat diketahui nilai DW (d) sebesar 1,956. Untuk menguji autokorelasi, maka angka DW dibandingkan dengan nilai d_u dan d_l dalam tabel Durbin Watson dengan signifikan $\alpha = 5\%$. Jumlah sampel (n) = 100 dan jumlah variabel independen 3 ($k = 3$), maka dari tabel Durbin Watson diperoleh nilai batas bawah (d_l) sebesar 1,613 dan nilai batas atas (d_u) sebesar 1,736. Karena hasil pengujiannya adalah $d_u < d < 4-d_u$ ($1,736 < 1,956 < 4-1,736$) atau $1,736 < 1,956 < 2,263$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

e. Uji Normalitas

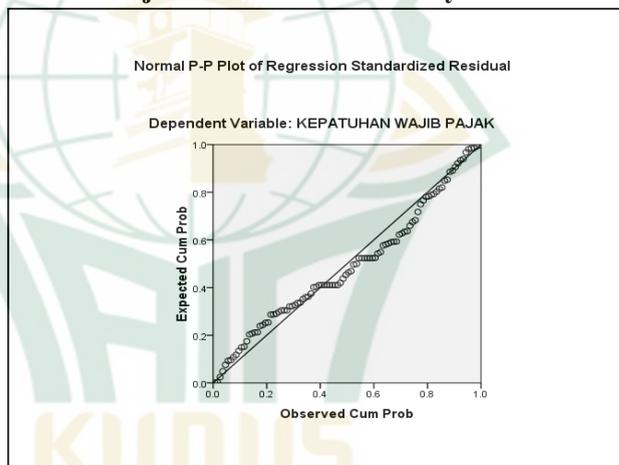
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram dan normal *probability plot*.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari

grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

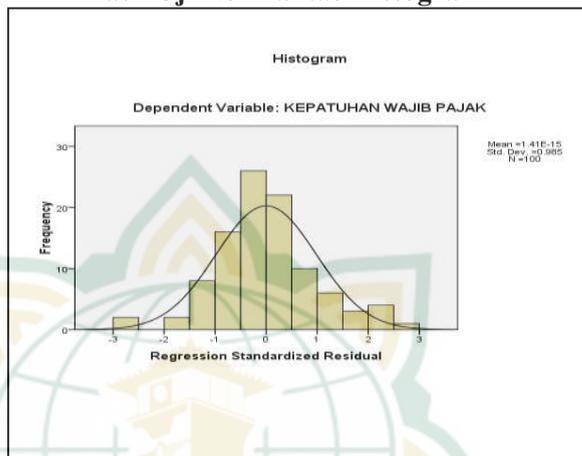
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas Probability Plot



Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Gambar 4.6
Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dengan melihat tampilan grafik normal plot maupun grafik histogram dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

f. Uji Heteroskedastisitas

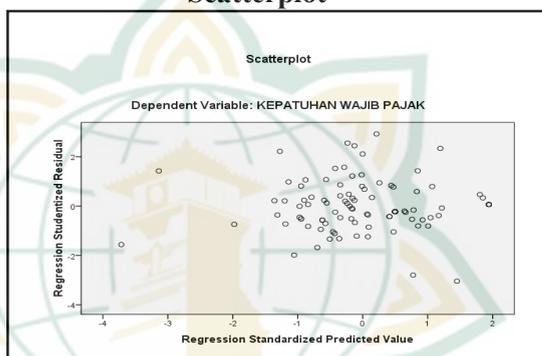
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini melihat penyebaran titik di *scatterplot*. Dasar analisisnya yaitu:

1. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi.

2. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.²

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Gambar 4.7
Scatterplot



Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari gambar *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memperediksi pngaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara.

g. Hasil Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen

² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, 160-163.

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 16 maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients
	B
(constan)	3,119
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,148
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,605
Biaya Kepatuhan (X3)	0,397

Sumber: hasil data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dijelaskan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3,119 + 0,148 X_1 + 0,605 X_2 + 0,397$$

$$X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

X₁ : Pengetahuan Perpajakan

X₂ : Kesadaran Wajib Pajak

X₃ : Biaya Kepatuhan

b₁ : Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan

b₂ : Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

b₃ : Koefisien regresi variabel biaya kepatuhan

e : Variabel independen lain diluar model regresi

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai sebesar 3,119 merupakan konstanta, artinya jika variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan biaya kepatuhan

(X_3) nilainya adalah 0 (nol), maka variabel kepatuhan wajib pajak berada pada angka 3,119.

2. Koefisien regresi (X_1) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b_1) = 0,148 hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel pengetahuan perpajakan (X_1) maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 14,8% dengan anggapan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) dan biaya kepatuhan (X_3) adalah konstan.
3. Koefisien regresi (X_2) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b_2) = 0,605 hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 60,5% dengan anggapan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan biaya kepatuhan (X_3) adalah konstan.
4. Koefisien regresi (X_3) dari perhitungan regresi berganda didapat nilai *coefficient* (b_3) = 0,397 hal ini berarti setiap ada peningkatan pada variabel biaya kepatuhan (X_3) maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 39,7% dengan anggapan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) adalah konstan.

h. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik sampel menggunakan data. R^2 mengukur seberapa jumlah reduksi dalam variabel *dependent* yang diperoleh dari pengguna variabel bebas. R^2 mempunyai nilai antara 0 sampai 1, dengan R^2 yang tinggi berkisar antara 0,7 sampai 1. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,945	0,892	0,889	2,280	1,956

Sumber: hasil data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,889, yang berarti bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 88,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 88,9%., sedangkan sisanya 11,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain penelitian ini.

i. Uji Parsial (uji t)

Pengujian parsial (uji t) bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis secara individual. Uji parsial ini yang terdapat dalam hasil perhitungan statistik ditunjukkan dengan t_{hitung} . Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Tabel distribusi t dicari derajat pada derajat kebebasan ($df = n - k - 1$ ($n =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen)). Sehingga tabel diperoleh $df = 100 - 3 - 1 = 96$ dengan signifikansi 5% : 2 = 0,025 (karena dua sisi) adalah 1,985. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas > 0,05 H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 16 maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constan)	3,119	1,239		2,518	0,013
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,148	0,049	0,157	3,026	0,003
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,605	0,084	0,506	7,180	0,000
Biaya Kepatuhan (X3)	0,397	0,069	0,350	5,786	0,000

Sumber: hasil data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka dapat dilihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan

H1 = (Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara).

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,026 dan tingkat probabilitas signifikan-t (*p-value*) sebesar 0,003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} $3,026 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara, sehingga **H₁ diterima**.

2. Kesadaran Wajib Pajak

H2 = (Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara).

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,180 dan tingkat probabilitas signifikan-t (*p-value*) sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} $7,180 > 1,985$ dan

nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara, sehingga **H₂ diterima**.

3. Biaya Kepatuhan

H3 = (Diduga biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara).

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,786 dan tingkat probabilitas signifikan-t (*p-value*) sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} 5,786 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara, sehingga **H₃ diterima**.

j. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:³

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil uji F (simultan) dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 16 maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4140,023	3	1380,008	265,505	0,000
Residual	498,977	96	5,198		
Total	4639,000	99			

Sumber: hasil data primer yang diolah, 2019

³ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 98.

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F_{hitung} sebesar 265,505 dan F_{tabel} sebesar 2,70 ($df_1=3$ dan $df_2=n-k-1=100-3-1=96$) sehingga dapat disimpulkan ($265,505 > 2,70$) F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Hal ini berarti H_4 yang berbunyi: Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 diterima dan H_0 ditolak. Maka model regresi bisa dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Hipotesis pertama yang di uji dalam penelitian ini “Diduga terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21”. Hasil dari uji SPSS menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **H_1 Diterima**.

Hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa analisis regresi berganda mempunyai pengaruh positif karena nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X_1) positif sebesar 0,148. Artinya variabel pengetahuan perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Apabila variabel pengetahuan perpajakan (X_1) naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,148, sehingga dapat dikatakan semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak..

Selain itu juga dibuktikan pada Tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,026 > 1,985$

dengan nilai signifikansi $0,003 < (\alpha) 0,05$. Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak PPh 21. Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak PPh 21 sebesar 3,026. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak PPh 21.

Bukti yang mendukung hasil pengujian hipotesis adalah pernyataan responden (hasil angket) tentang pengetahuan perpajakan. Yang didalamnya meliputi indikator: batas waktu pelaporan SPT, prosedur pembayaran pajak penghasilan, batas waktu membayar pajak, peraturan perpajakan, mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak, sanksi tidak membayar pajak, sanksi terlambat melaporkan SPT, tata cara mendapatkan NPWP dan tarif pajak yang di bayarkan. Mayoritas responden dengan berbagai indikatornya yang menjawab setuju 40,2%, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dari keseluruhan indikator tersebut adalah setuju. Hal ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sarah Nisa Santoso, Heru Susilo, Sri Sulasmiyati menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,217 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,761 tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan oleh Carolina V bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Hipotesis kedua yang di uji dalam penelitian ini “Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21”. Hasil dari uji SPSS menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, sehingga **H₂ diterima**.

Hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa analisis regresi berganda mempunyai pengaruh positif karena nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X₂) positif sebesar 0,605. Artinya variabel kesadaran wajib pajak (X₂) mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Apabila variabel kesadaran wajib pajak (X₂) naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,605, sehingga dapat dikatakan semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak..

⁴ Sarah Nisa Santoso, dkk, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen), 5.

⁵ Carolina V, “Pengetahuan Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Selain itu juga dibuktikan dari tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,180 > 1,985$ dengan nilai signifikansi $0,000 < (\alpha) 0,05$. Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak PPh 21. Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak PPh 21 sebesar 7,180. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak PPh 21.

Bukti yang mendukung hasil pengujian hipotesis adalah pernyataan responden (hasil angket) tentang kesadaran wajib pajak. Yang didalamnya meliputi indikator: membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, membayar pajak bentuk pengabdian kepada negara, membayar pajak untuk pembangunan negara, manfaat yang diterima dari membayar pajak, menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa paksaan, menunda membayar pajak dapat merugikan negara, mengurangi beban pajak dapat merugikan negara, dan menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Mayoritas responden dengan berbagai indikatornya yang menjawab setuju 42,7%, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dari keseluruhan indikator tersebut adalah setuju. Hal ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Dona Fitria menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,007 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,757 > t_{tabel} 1,985$. Dengan demikian, nilai signifikan dan t_{hitung} berada pada

daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori nugroho dalam jurnal Dona Fitria bahwa kesadaran merupakan keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang dieban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Hipotesis ketiga yang di uji dalam penelitian ini “Diduga biaya pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21”. Hasil dari uji SPSS menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, sehingga **H_3 diterima**.

Hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa analisis regresi berganda mempunyai pengaruh positif karena nilai koefisien biaya kepatuhan (X_3) positif sebesar 0,397. Artinya variabel biaya kepatuhan (X_3) mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Apabila biaya kepatuhan (X_3) naik 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,397, sehingga dapat dikatakan

⁶ Dona Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal of Applied Business and Economics*, Vol.4 No.1, September 2017, 33.

semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak..

Selain itu juga dibuktikan dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,786 > 1,985$ atau nilai signifikansi $0,003 < (\alpha) 0,05$. Dengan demikian pengujian menunjukkan H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini berarti biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21. Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak PPh 21 sebesar 5,786. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak PPh 21 .

Bukti yang mendukung hasil pengujian hipotesis adalah pernyataan responden (hasil angket) tentang biaya kepatuhan. Yang didalamnya meliputi indikator: biaya jasa konsultan pajak, biaya belajar tentang pajak, biaya transportasi, biaya penyimpanan dan pengarsipan dokumen pajak, biaya fotocopy dokumen, biaya mempersiapkan berkas pajak, meluangkan waktu untuk menyetorkan pajak, dan meluangkan waktu untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuk. Mayoritas responden dengan berbagai indikatornya yang menjawab setuju 36,9%, menyatakan bahwa biaya kepatuhan dari keseluruhan indikator tersebut adalah setuju. Hal ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,247 dan nilai t_{hitung} sebesar 6,633 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$ yang berarti apabila biaya kepatuhan pajak

semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.⁷

Sanford menjelaskan dalam jurnal Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar bahwa biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) dapat dibagi menjadi tiga yakni: 1) biaya uang (*direct money card*), 2) biaya waktu (*time cost*), 3) biaya pikiran (*psychological cost*). Semakin tinggi *tax compliance cost* (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan wajib pajak, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21. Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara

Hasil pengujian statistik, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan biaya kepatuhan kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 265,505 sedang F_{tabel} sebesar 2,70 dan tingkat probabilitas atau signifikansi 0,000. Dengan demikian karena tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($265,505 > 2,70$) maka pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan biaya kepatuhan merupakan variabel bebas yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian ini berarti H4 diterima, yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran

⁷ Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-JRA, Vol. 07 No.07, Agustus 2018, 10.

wajib pajak, dan biaya kepatuhan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Dalam penelitian ini hasil analisis regresi linier berganda yang terdapat dalam table 4.13 diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *Adjusted R Square* adalah 0,889 atau 88,9%. Hal ini berarti sebesar 88,9% kemampuan model regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 88,9% variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan. Sedangkan 11,1% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).

